

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)

Oleh :

Khodri Zulharman

Pembimbing : Zulfahridar dan Hariadi

Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : khodrizulharman@yahoo.com

*The Influence Of Implementation Local Government Accounting System, The
Understanding Of Accounting, The Adherence Of The Law Regulation
On The Performance Accountability Of Government Institution
(Studies on Pekanbaru Regency Government)*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementation local government accounting system, the understanding of accounting, and the adherence of the law regulation on the performance accountability of government institution. Population and sample in this study was SKPD the city of Pekanbaru. Collecting data using primary data collection, the questionnaires by using sensus technique. This study used multiple linier regression analysis techniques. The results of this study were : 1). Implementation of local government accounting system positive effect on the performance accountability goverment institution. 2). Understanding of accounting has a positive effect on the performance accountability goverment institution. 3). The adherence of the law regulation positive effect on the performance accountability goverment institution.

Keyword : performance accountability, accounting system, the adherence, and the law regulation.

PENDAHULUAN

Konsep akuntabilitas di Indonesia bukanlah hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini, khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan nonkeuangan (BPKP, 2002). Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik berkenaan dengan (1) partisipasi; (2) aturan hukum; (3)

transparansi; (4) responsif; (5) orientasi konsensus; (6) keadilan; (7) efektif dan efisien; dan (8) visi strategis (Mardiasmo, 2002; UNDP dalam LAN, 2000). Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia memperlihatkan upaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan amanah dari seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus serius dalam memberikan pelayanan yang baik dan bebas dari segala tindak kecurangan.

Pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi.

LHP atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2013 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2013. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kota Pekanbaru pada tahun – tahun sebelumnya. Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak atas penyajian saldo piutang retribusi, saldo investasi permanen, dan saldo aset tetap, dalam semua hal yang material, untuk posisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru per 31 Desember 2013, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Opini WDP yang diberikan oleh BPK pada kebijakan pemerintah daerah sebagai berikut. (1) Piutang retribusi. penyajian piutang retribusi dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2013, diantaranya merupakan piutang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan

(DTRB). Sebagian nilai piutang retribusi IMB tersebut tidak didasarkan kepada pengawasan/pemeriksaan fisik, tidak didukung dengan bukti yang memadai dalam perhitungan dan penetapan. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 2013 tersebut;

(2) Investasi permanen. penyajian investasi permanen dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2013 merupakan penyertaan modal pada enam BUMD yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah;

(3) Aset tetap. Penyajian sebagian nilai aset tetap dalam Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2013 tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai tentang rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi dan nilai perolehan. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Tetap per 31 Desember tersebut.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah : 1) Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ? 2) Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ? 3) Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. 2) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3) Untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 4) Untuk mengetahui pengaruh peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

TELAAH PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bias diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2005:49), di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pengukuran kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat penting, karena pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksudkan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita suatu bangsa. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem adalah suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi dan berulang yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Anthony, 2005). Akuntansi merupakan suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 yakni: "Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan, atau transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer .

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri untuk selalu meninjau dan melaporkan pengelolaan sumber daya.

Pemahaman Akuntansi

Tidak ada definisi yang cukup umum untuk dapat menjelaskan apa sebenarnya akuntansi itu. Oleh karena itu banyak definisi yang diajukan oleh para ahli atau buku teks tentang pengertian akuntansi. *American Accounting Association* dalam Sumarso S.R (1999) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Suwardjono (2005), dalam bukunya yang berjudul Teori Akuntansi, menjelaskan bahwa pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan posisi keuangan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Paket Undang-undang bidang keuangan negara merupakan suatu paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik Indonesia, diantaranya PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan yang mengatur keuangan daerah adalah peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, peraturan ini terdiri dari 18 bab dan 154 pasal. Peraturan tersebut mengacu pada peraturan yang ditetapkan sebelumnya terutama UU No. 32

tentang pemerintah daerah dan UU nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 32 mengamanatkan bentuk dan isi laporan keuangan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

Hipotesis Penelitian

Adapun yang menjadi hipotesis dalam skripsi ini adalah:

H₁: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H₂: Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas kinerja.

H₃: Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

METODE PENELITIAN

Penulis mengambil lokasi penelitian pada seluruh Instansi wajib LAKIP pada Pemerintah Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat setingkat eselon II, III dan IV yang terdiri dari kepala SKPD, kepala bagian keuangan dan staf bagian keuangan pemerintah kota Pekanbaru. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat didefinisikan sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.

Sampel adalah sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 2010: 116). Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti (Sugiyono

: 2012). Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat setingkat eselon II, III dan IV SKPD Kota Pekanbaru. Peneliti mengasumsikan setiap SKPD menyerahkan 3 kuisisioner, dengan adanya jumlah SKPD yang tertera di populasi sebanyak 30 SKPD, maka yang akan diteliti sebanyak 90 orang. Dalam skripsi ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah data primer berupa kuesioner. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang telah dirumuskan untuk mencatat jawaban dari para responden (Sekaran, 2006).

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam skripsi ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert yang dengan 5 (lima) poin yang berkaitan dengan lima pilihan, yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Ragu, 4) Setuju, dan 5) Sangat Setuju.

Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu:

a. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Variabel SAPD diukur dengan pertanyaan yang sebelumnya sudah digunakan Suriati (2012) dengan 3 indikator yaitu pencatatan, penggolongan, dan pelaporan. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independen adalah kuesioner yang dikembangkan dari peneliti – peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert yang dengan 5 (lima) poin yang berkaitan dengan lima pilihan.

b. Pemahaman Akuntansi

Variabel ini mengukur sejauh mana pihak pemerintah daerah Kota Pekanbaru mampu mengkoordinasikan dan menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Variabel Pemahaman Akuntansi diukur dengan pertanyaan yang sebelumnya sudah digunakan Famela (2009) dengan indikator yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

c. Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Ketaatan peraturan perundangan mengacu dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Sistem hukum yang berlaku di suatu Negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah Negara yang bersangkutan menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan

perundangan, termasuk didalamnya aturan – aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka keperluan penelitian, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Hasil survei kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan dari 90 kuesioner yang disebarkan kepada 90 responden, didapat sebanyak 90 kuesioner yang memenuhi karakteristik data penelitian.

Karakteristik Responden Penelitian

Tabel 1

Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin :		
- Laki - laki	48	53,3%
- Perempuan	42	46,7%
Pendidikan :		
- SMA	2	2,2%
- Diploma	5	5,6%
- S1	56	62,2%
- S2	27	30,0%
Umur :		
- 20 - 30 tahun	5	5,6%
- 31 - 40 tahun	10	11,1%
- 41 - 50 tahun	58	64,4%
- > 51 tahun	17	18,9%
Lama Bekerja :		
- < 5 tahun	10	11,1%
- 5-10 tahun	28	31,1%
- > 10 tahun	52	57,8%

Sumber : Data Olahan 2015.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah responden laki – laki lebih banyak dibanding responden perempuan. Jumlah responden laki – laki sebanyak 48 orang (53,3%) dan perempuan sebanyak 42 orang (46,7%). Selain itu dapat diketahui bahwa sebagian besar responden atau 56 orang (62,2%) berpendidikan S1, kemudian responden berpendidikan S2 sebanyak 27 orang (30,0%), responden berpendidikan Diploma sebanyak 5 orang (5,6%) dan yang berpendidikan SMA hanya 2 orang (2,2%). Hal ini mengindikasikan bahwa pejabat setingkat eselon II, III dan IV yang terdiri dari kepala SKPD, kepala bagian keuangan dan staf bagian keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan pekerjaan profesional dan membutuhkan pendidikan yang tinggi.

Terlihat usia masing – masing responden dimana sebagian besar responden berusia antara 41 sampai 50 tahun yakni sebanyak 58 orang (64,4%), yang berusia diatas 51 tahun sebanyak 17 orang (18,9%), yang berusia diantara 31-40 tahun sebanyak 10 orang (11,1%) dan yang berusia diantara 20 sampai 30 tahun sebanyak 5 orang (5,6%). Sedangkan mayoritas responden bekerja diatas 10 tahun yaitu sebanyak 52 orang (57,8%), kemudian yang bekerja antara 5 sampai dengan 10 tahun sebanyak 28 orang (31,1%) dan yang bekerja bawah 5 tahun adalah sebanyak 10 orang (11,1%). Kondisi ini memberi gambaran bahwa rata-rata responden telah memiliki masa kerja diatas 10 tahun.

Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian tersebut disajikan

dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan kisaran teoritis dan sesungguhnya, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Teoritis		Sesungguhnya		
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	SD
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X_1)	9-45	18	31-45	38,0000	3,61955
Pemahaman Akuntansi (X_2)	10-50	20	29-48	41,0556	3,32292
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_3)	3-15	6	8-15	12,8778	1,56383
Akuntabilitas Kinerja (Y)	4-20	8	12-20	16,9667	1,89885

Sumber : Data Olahan, 2015.

Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari 9 instrumen pernyataan yang diukur menggunakan skala *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 31-45 dengan kisaran teoritis 9-45. Nilai *mean* sesungguhnya dan *mean* teoritis untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebesar 3,61955. Variabel Pemahaman Akuntansi terdiri dari 10 instrumen pernyataan yang diukur menggunakan skala *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 29-48 dengan kisaran teoritis 10-50. Nilai *mean* sesungguhnya dan *mean* teoritis untuk variabel Pemahaman Akuntansi masing-masing sebesar 41,0556 dan 20 dengan nilai Standar deviasi untuk variabel Pemahaman Akuntansi ini adalah sebesar 3,32292.

Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terdiri dari 3 instrumen pernyataan yang diukur menggunakan skala *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 8-15 dengan kisaran teoritis 3-15. Nilai *mean* sesungguhnya dan *mean* teoritis untuk variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan masing-masing sebesar 12,8778 dan 6 dengan nilai standar deviasi untuk variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan ini adalah sebesar 1,56383.

Variabel Akuntabilitas Kinerja terdiri dari 4 instrumen pernyataan yang diukur menggunakan skala *likert* 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 12-20 dengan kisaran teoritis 4-20. Nilai *mean* sesungguhnya dan *mean* teoritis untuk variabel Akuntabilitas Kinerja masing-masing sebesar 16,9667 dan 8 dengan nilai standar deviasi untuk variabel Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebesar 1,89885. Berdasarkan data diatas, nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang akan digunakan adalah layak dan valid.

Hasil Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas Data

Penelitian terdiri dari 26 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk degree of freedom (df) = $n - 2$ dengan alpha 0,05, n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($90-2$) = 88, sehingga didapat *r* tabel untuk df (88) = 0,210.

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan

yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai r hitung seluruh indikator variabel lebih besar dari r tabel $n = 90, \alpha = 5\% = 0,210$.

Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Hasil Uji Realibilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X_1)	0,823	0,6	Reliabel
Pemahaman Akuntansi (X_2)	0,840	0,6	Reliabel
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_3)	0,847	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,796	0,6	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2015.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *cronbach alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0.60. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas di atas terlihat bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Berikut tabel hasil uji normalitas data :

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal	Mean	0.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	0.55765513
Most Extreme Differences	Absolute	0.063
	Positive	0.063
	Negative	-0.048
Kolmogorov-Smirnov Z		0.599
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.866

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan, 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Assymp Sig Kolmogorov – Smirnov (K-S)* lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinieritas Data

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen (Santoso, 2004). Untuk mendeteksi dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari tiap-tiap variabel independen. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih dapat ditolerir.

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinieritas Data

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X_1)	0,958	1,044
Pemahaman Akuntansi (X_2)	0,970	1,031
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_3)	0,979	1,021

Sumber : Data Olahan, 2015.

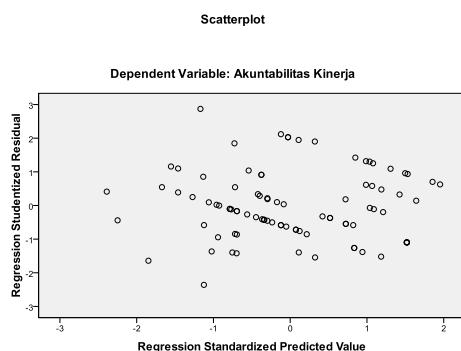
Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel independen < 10 dan *tollerance* $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas Data

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar

1



Sumber : Olahan SPSS, 2015.

Dari gambar grafik *Scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi Data

Autokorelasi adalah keadaan di mana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	N	Keterangan
1.780	90	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber : Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai d_{hitung} (Durbin Watson) terletak antara -2 dan 2 = $-2 < 1.780 < 2$. Dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis penelitian dilakukan terhadap hasil perhitungan dan pengujian data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada pejabat setingkat eselon II, III dan IV SKPD Kota Pekanbaru. Berdasarkan output

SPSS, hasil analisis regresi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	t-tabel
	B	Std. Error	Beta	hitung		
1 (Constant)	0.094	0.502		0.188	0.851	1.988
Penerapan SAPD	0.532	0.107	0.444	4.963	0.000	
Pemahaman Akuntansi	0.283	0.120	0.210	2.366	0.020	
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	0.182	0.080	0.200	2.264	0.026	

Sumber : Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan hasil uji hipotesis tabel 4.12 diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear bergandanya sebagai berikut :

$$Y = 0,094 + 0,532 X_1 + 0,283 X_2 + 0,182 X_3$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,094 menyatakan bahwa jika variabel bebas dianggap konstan maka akuntabilitas kinerja sebesar 0.094.
2. Koefisien variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 0,532 menyatakan bahwa setiap peningkatan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebesar 0,532%.
3. Koefisien variabel Pemahaman Akuntansi sebesar 0,283 menyatakan bahwa setiap peningkatan Pemahaman Akuntansi sebesar 1% maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebesar 0,283%.
4. Koefisien variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan sebesar 0,182

menyatakan bahwa setiap peningkatan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan sebesar 1% maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.182%

Hasil Uji Goodness Of Fit

Tabel 8
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,585 ^a	0,342	0,319	0,56730

Sumber: Olahan SPSS, 2015.

Dari tabel diatas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,319. Artinya adalah bahwa kemampuan variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan Perundangan dalam menerangkan Akuntabilitas Kinerja adalah sebesar 31,9%, sedangkan sisanya 68,1% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Hasil pengujian analisis regresi hipotesis pertama pada penelitian ini dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 9
Hasil Regresi H₁

Variabel Independen	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	4,963	1,988	0,000	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan tabel diatas, dengan menggunakan uji t maka dapat diketahui bahwa variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 4,963 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,988 dan dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,963 > 1,988$) dan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima atau dengan kata lain variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Pekanbaru.

Hasil Pengujian Hipotesis H_2

Hasil pengujian analisis regresi hipotesis kedua pada penelitian ini dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 10
Hasil Regresi H_2

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Pemahaman Akuntansi (X2)	2,366	1,988	0,020	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dengan menggunakan uji t maka dapat diketahui bahwa variabel Pemahaman Akuntansi mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2,366 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,988 dan dengan nilai

signifikansi 0,020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Akuntansi nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,366 > 1,988$) dan dengan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima atau dengan kata lain variabel Pemahaman Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap instansi pemerintah pada SKPD Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada SKPD Pekanbaru.

Hasil Pengujian Hipotesis H_3

Hasil pengujian analisis regresi hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 11
Hasil Regresi H_1

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	2,264	1,988	0,026	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan tabel diatas, dengan menggunakan uji t maka dapat diketahui bahwa variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2,264 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,988 dan dengan nilai signifikansi 0,026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,264 > 1,988$) dan dengan nilai signifikansi $0,026 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima atau dengan kata lain variabel Ketaatan Pada Peraturan

Perundangan berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap instansi pemerintah pada SKPD Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketaatan pada peraturan Perundangan akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada SKPD Pekanbaru.

Hasil Uji Simultan (Uji f)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistis.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka ; H_a ditolak

Ho ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka : H_a diterima

Pengaruh variable sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan Perundangan terhadap akuntabilitas kinerja dapat dilihat dengan menggunakan uji – F pada tabel berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F-hitung	Sig.
1	Regression	14.382	3	4.794	14.897	0.000 ^a
	Residual	27.677	86	0.322		
	Total	42.060	89			

Sumber: Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji f) seperti yang tampak pada Tabel 4.17 diketahui F_{hitung} sebesar 14,897 dengan signifikansi 0,000. F_{tabel} dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= n - k - 1; k \\ &= 90 - 3 - 1; 3 \\ &= 86; 3 \end{aligned}$$

$$= 2,714$$

Keterangan :

n: jumlah sampel

k: jumlah variabel bebas

1: konstan

Dengan demikian diketahui $F_{hitung} (14,897) > F_{tabel} (2,714)$ dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan Perundangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data melalui SPSS diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah maka semakin tingginya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru.

2. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi maka semakin tingginya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru.

3. Ketaatan pada peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota

Pekanbaru. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketaatan pada peraturan Perundangan maka semakin tingginya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru.

4. Secara bersama-sama (simultan) variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru.

5. Hubungan antar sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan Perundangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru tergolong kuat/tinggi.

6. Kemampuan variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan Perundangan dalam menerangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru adalah sebesar 31,9%.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan bagi peneliti berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk hasil yang lebih baik, perlu ditambahkan metode lain selain penyebaran kuesioner seperti metode wawancara/interview untuk mendukung penjelasan hasil penelitian.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyebarkan kuesioner untuk jumlah sampel yang lebih banyak agar lebih dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja dengan lebih baik
3. Dikarenakan kemampuan variabel sistem akuntansi

pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan Perundangan dalam menerangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru hanya sebesar 31,9%, maka untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel agar diperoleh gambaran mengenai akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 2002. *Diskusi tentang Akuntabilitas*,
www.bpkp.go.id
- Fatmala.Juanita.2014.Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah.
- Halim.Abdul.2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ketiga. Jakarta:Salemba Empat.
- Inpres No. 7 Tahun 1999, *Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mardiasmo,2002,Akuntansi Sektor Publik,Ed1, cet,Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods For Business*, Salemba Empat. Jakarta.

Sumiati. 2012. Tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Siak.

Suwardjono, 2005. Teori Akuntansi: Perencanaan dan Pelaporan Keuangan (Edisi III). Yogyakarta: BPFE.

UU No. 32 tentang pemerintahan daerah

UU Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah